



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 07 Januari 2017

Praktek Tembang Pilih

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diberlakukan, namun ternyata implementasinya belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah.

Praktek kolusi, nepotisme serta pemberlakuan tembang pilih masih dirasakan sebagian anak bangsa di daerah ini khususnya di Kota Ambon, terhadap bentuk-bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot)..

Buktinya, sebagian kontraktor menilai, Pemkot setempat tembang pilih dalam melunasi proyek-proyek yang sudah dikerjakan sejumlah kontraktor selama tahun anggaran 2016.

Belum dilunasi sebagian kontraktor disebabkan, sejumlah proyek yang hingga kini masih dikerjakan akibat belum rampung padahal, tahun anggaran telah selesai. Anehnya, anggaran proyek dimaksud justru telah dikucurkan 100 persen oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Sebaliknya, kontraktor yang proyeknya sudah rampung 100 persen, ternyata hingga kini belum dilunasi proyeknya. Bahkan hanya dijanjikan untuk dibayarkan tanpa ada kejelasan kapan waktunya.

Sistim tembang pilih, tidak transparan, nepotisme ataupun kolusi adalah praktek-praktek yang tidak menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang berdampak pelayanan publik semakin tidak transparan, publik berhak memperoleh informasi soal pembayaran proyek tersebut yang seharusnya dijelaskan secara transparan, sehingga tidak memunculkan opini tembang pilih.

Karena itu wajar saja jika sejumlah kontraktor menilai Pemkot tembang pilih. Proses inilah yang seharusnya menjadi bahan perubahan agar di tahun ini, semangat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, termasuk pelayanan publik haruslah maksimal diterapkan oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) dilingkup Pemkot Ambon.

Karena itu, Pemkot harus segera menyusun daftar proyek mana saja yang belum dibayar untuk diusulkan kepada DPRD, dan dibayar menggunakan APBD 2017, sehingga hak-hak kontraktor dapat secepatnya direalisasi dan tidak ada penilai tembang pilih.

Publik tentu berharap, Pemkot Ambon tidak tebang pilih, penerapan transparansi kepada publik haruslah mampu diimplementasikan, sehingga pelayanan publik semakin dirasakan masyarakat.(*)